

Presiden: Indonesia Dapat Pengadaan Vaksin Jumlah Besar Hingga 2021

JAKARTA - Indonesia telah memperoleh komitmen penyediaan vaksin dalam jumlah sangat besar sebanyak 290 juta dosis vaksin COVID-19 hingga tahun 2021 di samping juga sampai akhir 2020, Indonesia diketahui memiliki komitmen pengadaan vaksin sebanyak 20 juta-30 juta dosis vaksin COVID-19.

"Tadi saya sudah mendapat laporan dari Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN, sampai 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta. Itu jumlah yang sangat besar," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).

Komitmen tersebut merupakan buah kesepakatan awal antara pemerintah melalui Bio Farma dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama ditambah dengan kapasitas produksi

sendiri milik Bio Farma yang tengah ditingkatkan.

Saat ini, negara-negara lain juga berupaya untuk memperoleh komitmen pengadaan vaksin COVID-19 apabila nantinya ditemukan. Indonesia termasuk salah satu negara yang berupaya memperoleh ketersediaan vaksin tersebut baik bekerja sama baik dengan pihak luar maupun mengupayakan produksi di dalam negeri. "Negara lain mungkin sejuta dua juta saja belum dapat, kita sudah dapat komitmen 290 juta baik yang diproduksi di sini maupun nanti yang diproduksikan di luar. Saya kira ini

berita yang sangat bagus," tuturnya.

Selain komitmen tersebut, Indonesia juga memiliki kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan sendiri. Sejumlah institusi riset di dalam negeri diketahui tengah melakukan pengembangan vaksin 'Merah Putih' tersebut.

"Nanti vaksin Merah Putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya tidak apa dijual ke negara lain. Negara lain ini di ASEAN saja saya lihat belum ada yang siap dengan vaksin yang sebanyak yang saya sampaikan," tandasnya.

Sebelum ditemukannya vaksin tersebut, Kepala Negara mengingatkan jajarannya dan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

(ANTARA)

Gubernur Jateng: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Diterapkan Pekan Ini

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Provinsi Jawa Tengah akan diterapkan mulai pekan ini sebagai upaya mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

"Mulai pekan ini, penegakan hukum (pelanggar protokol kesehatan, red) akan dilakukan secara masif dan serentak di seluruh daerah Jawa Tengah," katanya usai mengikuti rapat rutin koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Semarang, Senin (24/8).

Terkait dengan hal itu, Ganjar memerintahkan seluruh bupati/wali kota secara serentak melakukan upaya represif penegakan hukum protokol kesehatan setelah tahapan sosialisasi. Ganjar juga mengaku sudah menyusun Peraturan Gubernur yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut dan meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan rencana

atau program penegakan hukum secara serentak di seluruh Jawa Tengah.

Menurut dia, pergub yang diberikan sebagai panduan bersifat umum dan masing-masing daerah diberikan wewenang untuk menyiapkan sanksinya masing-masing. "Sanksinya macam-macam, aturan yang saya buat umum, bisa teguran lisan, tertulis, pencabutan izin sementara untuk usaha, atau denda dan lainnya. Beberapa kabupaten/kota sudah punya aturan sendiri, misalnya Banyumas ada sanksi pencabutan KTP hingga sidang ke Pengadilan, Kota Semarang diberikan sanksi menyapu jalan dan lainnya," ujarnya.

Seluruh bupati/wali kota, lanjut Ganjar, diminta segera membuat Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota guna menindaklanjuti penegakan hukum ini sehingga peraturan ini bisa cepat ditegakkan dan masyarakat yang melanggar mendapatkan efek jera.

(ANTARA)

Presiden Luncurkan Banpres Produktif Usaha Mikro

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai skema insentif tambahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19.

"Pemerintah telah meluncurkan 4 bulan ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Hari ini kita tambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil yaitu yang namanya banpres produktif, untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil," kata Presiden dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8).

Presiden mengatakan BPUM senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro dan kecil ini, menambah skema insentif yang selama ini sudah diberikan seperti subsidi bunga, insentif pajak UMKM, kredit modal kerja, serta penempatan dana di perbankan untuk UMKM.

BPUM yang bersifat hibah ini akan diberikan ba-



ANTARA/Tangkapan layar YouTube Setpres/pri.

Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin berbincang dengan pelaku usaha mikro dan kecil setelah meluncurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Merdeka Jakarta, Senin, (24/8).

gi 12 juta usaha mikro dan kecil dengan cara ditransfer langsung ke rekening pelaku usaha mikro dan kecil. "Nanti tolong dicek rekening masing-masing sudah ditransfer belum atau paling lambat besok dilihat. Yang belum dapat nanti secara bertahap akan masuk ke rekening bapak ibu," kata Presiden.

Presiden berharap BPUM betul-betul dimanfaatkan pelaku usaha untuk menambah modal kerja, bukan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Presiden mengakhiri sam-

butannya dengan meluncurkan BPUM disaksikan perwakilan pelaku usaha mikro dan kecil. "Dengan mengucap Bismillahirohmanirrohm Banpres produktif untuk usaha mikro kecil saya nyatakan diluncurkan," tutup Presiden.

(ANTARA)

Disnakertrans DIY Pantau Subsidi Upah Pekerja Terdampak Pandemi

YOGYAKARTA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan memantau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pekerja terdampak pandemi COVID-19 sebesar Rp 600 ribu per bulan mulai 25 Agustus 2020.

"Kami berharap penyaluran bantuan subsidi itu dapat diberikan berdasarkan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh pekerja dengan bijaksana," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo di Yogyakarta, Senin (24/8).

Menurut dia, subsidi upah itu merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan bantuan sosial bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan agar mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

Ia mengatakan penyaluran bantuan itu sepenuhnya akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena akan ditujukan bagi pekerja yang sudah terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Basis penerimanya adalah yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sesuai data per Juni 2020," kata dia.

Sebelum memonitor penyalurannya, Bowo mengatakan, saat ini Disnakertrans DIY tengah mengencarkan sosialisasi mengenai BSU yang akan dikucurkan pemerintah selama empat bulan itu. "Sasaran sosialisasi saat ini sebagian besar untuk pekerja informal dan ada beberapa pekerja formal," kata dia.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad



FOTO ANTARA/Luqman Hakim

Pekerja di salah satu perusahaan kerajinan tangan di Kecamatan Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta.

Ade Irawan berharap bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan itu mampu menjangkau pekerja terdampak COVID-19 secara menyeluruh baik yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan maupun yang belum terdaftar. Peralannya, menurut Irsyad, buruh yang telah terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun yang belum terdaftar seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang taat membayar pajak serta sama-sama terdampak pandemi COVID-19.

Irsyad menyebutkan, berdasarkan data dari Bappeda DIY hingga 2019 tercatat dari 902.543 pekerja/buruh di DIY, hanya 367.723 buruh/pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, menurut dia, akan ada 534.820 pekerja atau buruh yang seharusnya terdaftar BPJS oleh perusahaannya ter-

ancam tidak mendapatkan bantuan itu. "Semua buruh adalah warga negara yang mengharap negara hadir di saat pandemi COVID-19 dengan kewajibannya untuk memberantas virus dan memperbaiki perekonomian buruh," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan mulai menyalurkan subsidi upah bagi penerima program tersebut pada 25 Agustus 2020. Anggaran total yang disiapkan untuk program subsidi upah tersebut sebesar Rp 37,7 triliun untuk 15 juta lebih pekerja yang menerima upah di bawah Rp 5 juta yang merupakan pekerja formal yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Subsidi upah diberikan selama empat bulan, diberikan per dua bulan sekali sebesar Rp 1,2 juta per dua bulan," kata Menteri Ida Fauziyah. (ANTARA)

Pasien Sembuh dari COVID-19 di DIY Bertambah 20 Orang

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di wilayah itu pada Senin (24/8) bertambah 20 orang, sehingga total menjadi 846 orang.

"Laporan jumlah kasus sembuh sebanyak 20 kasus sehingga total kasus sembuh menjadi sebanyak 846 kasus," kata Juru Bicara Penda DIY untuk Penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan jika dilihat berdasarkan wilayah domisili, 20 pasien sembuh itu terdiri atas satu kasus asal Kota Yogyakarta, tujuh kasus Kabupaten Bantul, empat kasus Gunung Kidul, serta delapan kasus Kabupaten Sleman.

Selain pasien sembuh, Berty juga mencatat 14 tambahan pasien terkonfirmasi positif, sehingga jumlah kasus positif COVID-19 di DIY



FOTO ANTARA/HO/Humas Penda DIY

Juru Bicara Penda DIY untuk Penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih

menjadi 1.207 orang. Berdasarkan wilayah domisili, 14 pasien yang tercatat sebagai kasus 1199 sampai 1212 itu terdiri atas enam kasus asal Kabupaten Bantul, tujuh kasus asal Sleman, serta satu kasus asal Kota Yogyakarta.

Sementara itu, jika mengacu riwayat kasusnya, mereka terbagi menjadi dua kasus hasil skrining karyawan kesehatan, lima kasus hasil tracing kontak, dua kasus perjalanan luar daerah, satu kasus kontak dengan anggota keluarga dari luar daerah, satu kasus hasil skrining masyarakat, serta tiga kasus masih dalam penelusuran.

Menurut Berty, tambahan kasus hari ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 560 sampel spesimen dari 461 orang. Ia juga mencatat satu kasus meninggal dunia yakni kasus 1061, laki laki, 58 tahun, Bantul dengan komorbid diabetes dan jantung.

Berdasarkan data dari rumah sakit rujukan, ia mencatat total suspek COVID-19 hingga Senin tercatat 11.337 orang. Dari jumlah suspek tersebut, 1.207 orang terkonfirmasi positif dimana 846 orang di antaranya sembuh, dan 34 orang meninggal. (ANTARA)

